

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian di lapangan, maka manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam rangka otonomi desa, Pemerintah Desa perlu mengoptimalkan pembentukan suatu lembaga ekonomi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Punten selaku lembaga ekonomi yang berada di desa Punten berusaha menerapkan proses manajemen yang baik. Manajemen BUMDes Punten sudah direncanakan melalui pola manajemen yang baik yakni meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Pola manajemen yang telah dilakukan oleh BUMDes Punten tersebut telah berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PADes) Punten.
 - a. Perencanaan (*Planning*) merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara mencapainya. Dalam proses perencanaan ini BUMDes Punten menerapkan empat tahapan dasar proses perencanaan yaitu menetapkan tujuan, merumuskan keadaan, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, serta yang terakhir mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai

tujuan. Dengan melaksanakan tahapan-tahapan tersebut diharapkan memudahkan BUMDes Punten dalam menyusun rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut BUMDes Punten dalam perencanaannya telah mengembangkan melalui unit usaha antara lain unit usaha PAM, unit usaha Pasar Desa, unit usaha Simpan-Pinjam dan unit usaha Pembayaran Listrik *On-line*.

- b. Dalam proses pengorganisasian (*Organizing*) manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja tertentu. Terdapat empat pilar yang diterapkan BUMDes Punten dalam melaksanakan proses pengorganisasian yang terdiri dari pembagian kerja, pengelompokkan pekerjaan, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi dan koordinasi. Empat pilar tersebut sudah diterapkan oleh BUMDes Punten dengan cukup baik, namun dalam tahap koordinasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik di mana terdapat pegawai yang belum cepat tanggap sehingga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pada masyarakat.
- c. Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (*Actuating*) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Fungsi pelaksanaan ini menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Terdapat empat pokok masalah yang dipelajari pada fungsi ini yaitu tingkah laku manusia, hubungan manusia,

komunikasi dan kepemimpinan. Dalam fungsi ini empat pokok tersebut kurang diterapkan dengan baik oleh BUMDes Punten yaitu pada pokok masalah tingkah laku manusia dan hubungan manusia. Namun sejauh ini manajemen BUMDes Punten sudah cukup baik karena sebagai lembaga ekonomi desa mampu memanfaatkan potensi dan aset yang dimiliki desa dan keberadaannya mampu memberikan kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) Punten.

- d. Fungsi pengawasan (*Controlling*) merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam proses pengawasan ada empat tahap yang harus dilalui dalam menjalankan proses ini, yaitu menetapkan standart, mengukur kinerja, membandingkan pelaksanaan dan memperbaiki penyimpangan. Pengawasan pada BUMDes Punten belum seluruhnya diterapkan. Dalam mengukur hasil yang telah dicapai dewan direksi selalu memantau dan memeriksa laporan keuangan tiap unit usaha. Pengawasan dilakukan melibatkan semua unsur yakni unsur pemerintah desa, unsur kelembagaan dan tokoh masyarakat.

2. Kendala yang mempengaruhi proses manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Punten, antara lain:
 - a. Keterbatasan modal yang dimiliki;
 - b. Kurangnya komunikasi antara Pengelola BUMDes dengan Warga.

B. Saran

1. Dalam hal hubungan pemerintahan antara Pemerintah Kota Batu dengan DPRD Kota Batu dan Pemerintah Desa Punten dapat ditekankan disini yakni posisi legal formal organisasi BUMDes Punten yang belum mendapatkan pengesahan legalitas kelembagaan oleh Pemerintah Daerah Kota Batu. Sebagaimana telah diketahui bahwa dengan adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP Nomor 43 Tahun 2014 mendukung adanya kelembagaan BUMDes ini, seharusnya Pemerintah Daerah Kota Batu memberikan payung hukum mengenai peraturan tentang BUMDes. Dan juga badan hukum BUMDes yang tidak jelas hingga 14 tahun berjalan ini, menjadi pengharapan besar dari penulis untuk mendapat perhatian dari pihak-pihak yang terkait tentang kejelasan badan hukum BUMDes Punten dalam upaya menggerakkan roda ekonomi desa dengan mengembangkan potensi yang ada di desanya.

2. Dalam hal permodalan, yang merupakan salah satu kendala yang dihadapi BUMDes Punten. Seharusnya Pemerintah Jawa Timur dan Pemerintah Kota Batu bekerjasama untuk memberikan modal, pendampingan dan sarana penunjang bagi BUMDes Punten dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya. Atau juga dapat diatasi dengan mengajukan proposal pengajuan anggaran dana untuk usaha BUMDes kepada pemerintah, dalam hal ini ditujukan ke Bapemas Provinsi Jawa Timur serta penyertaan pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan keberlangsungan unit usaha BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan tumbuh kembangnya badan usaha ini.
3. Perlu dilakukan tahap evaluasi dalam manajemen BUMDes Punten, sebab dalam hal ini proses manajemen yang dilakukan berakhir pada proses pengawasan. Evaluasi kinerja diperlukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja BUMDes Punten. Seharusnya dibuatkan buku pengaduan, apabila masyarakat ingin menyampaikan komplain/ pengaduan maka dapat mengisi dalam buku pengaduan yang nantinya komplain tersebut akan ditindaklanjuti atau bisa langsung menghadap kepala unit usaha. Sejauh ini BUMDes Punten belum pernah melakukan pendataan terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Evaluasi kinerja tersebut

berguna sebagai patokan membuat rencana strategis untuk beberapa tahun ke depan supaya BUMDes bisa lebih efektif dalam menjalankan visi dan misinya.